

197

Sekitar Penggalakan Perdagangan Indonesia-Uni Soviet*

Pande Radja SILALAH

Kunjungan Kadin Indonesia ke Uni Soviet beberapa waktu yang lalu dapat dikatakan berhasil dengan baik. Sebuah perjanjian kerjasama perdagangan antara Kadin Indonesia dan Kadin Soviet ditandatangani di mana dalam perjanjian itu dinyatakan hasrat kedua pihak untuk melakukan perdagangan langsung atas komoditi-komoditi yang diperlukan dan disepakati. Bersamaan dengan itu pihak Soviet berjanji akan membeli karet Indonesia dengan jumlah yang minimal sama dengan tahun 1983 yakni 60.000 ton. Di samping itu Uni Soviet juga menawarkan kredit bagi pengusaha Indonesia untuk pembangunan proyek-proyek yang layak dengan bunga yang cukup rendah yakni 6-8% setahun dengan masa tenggang 2-3 tahun, tanpa pembatasan bidang yang dapat digarap, termasuk pembangunan perumahan, industri mesin, industri kimia, pabrik kertas dan proyek tenaga listrik.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Komite Negara Urusan Hubungan Ekonomi Luar Negeri (KNHELN) Uni Soviet, Litvinenco, pada akhir dasawarsa 1950-an sampai dengan awal dasawarsa 1960-an kerjasama ekonomi Uni Soviet-Indonesia berkembang dengan baik. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang pertama yang membuat kerjasama ekonomi dengan Uni Soviet pada tahun 1956. Tetapi dalam pertengahan kedua dasawarsa 1960-an kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara mengalami kemunduran. Dengan demikian kesepakatan baru ini merupakan permulaan babak baru dalam hubungan dagang (ekonomi) antara kedua negara. Perkembangan ini tentu patut disoroti agar permasalahannya menjadi semakin jelas sehingga manfaat optimal dari peningkatan hubungan dagang antara kedua negara dapat dicapai.

DIVERSIFIKASI SUATU TUNTUTAN

Setiap negara yang menganut ekonomi terbuka, tidak dapat terlepas dari gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu setiap negara yang menganut ekonomi terbuka seperti Indonesia, pada dasarnya selalu berusaha menjadikan perekonomiannya kenyal dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia. Usaha ini biasanya dilakukan dengan berbagai cara dan salah satu yang paling menonjol daripadanya adalah usaha diversifikasi hasil produksi dan pemasarannya serta diversifikasi sumber bahan dan/atau barang yang dibutuhkan negara yang bersangkutan.

Kenyataan membuktikan bahwa sampai sekarang Indonesia belum berhasil dengan baik melakukan usaha diversifikasi. Data statistik menunjukkan misalnya bahwa sampai dengan tahun 1983 sebagian terbesar ekspor Indonesia (kira-kira 74%) terdiri dari minyak bumi dan gas alam cair padahal di segi lain sebagian terbesar penerimaan negara berasal dari Pajak Perseroan Minyak dan Gas. Tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, dalam tahun anggaran 1984/1985 lebih 64% penerimaan dalam negeri berasal dari penerimaan minyak dan gas alam. Gambaran ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sangat peka terhadap gejolak yang menyangkut minyak. Pengalaman telah menunjukkan kepada kita bahwa turunnya harga minyak beberapa waktu yang lalu telah berpengaruh besar bagi perekonomian Indonesia dan memaksa Indonesia melakukan tindakan devaluasi.

Tabel 1 menunjukkan bahwa baik ekspor maupun impor Indonesia sebagian besar ditujukan dan berasal dari beberapa negara tertentu. Dalam tahun 1982 kira-kira sebesar 15,9% ekspor Indonesia ditujukan ke Amerika Serikat, 50,2% ke Jepang dan 15,7% ke ASEAN. Sedang di sisi lain sebesar 14,3% impor Indonesia berasal dari Amerika Serikat, 25,4% dari Jepang dan 19,6% dari ASEAN. Gambaran seperti ini juga menunjukkan bahwa bila terjadi gejolak di negara-negara partner dagang utama akan berpengaruh besar bagi perekonomian Indonesia.

Dilihat dari kepentingan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, komposisi perdagangan seperti ini sulit untuk dipertahankan karena ketergantungan perdagangan yang bersifat asimetris seperti ini lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya. Kelesuan ekonomi di beberapa negara tertentu yang kebetulan menjadi partner dagang utama Indonesia yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini telah membuktikan hal tersebut.

Dalam beberapa tahun yang lalu banyak pengamat ekonomi secara gigih menganjurkan agar diversifikasi seperti yang dimaksudkan di atas secepat mungkin dilakukan. Tetapi melimpahnya penerimaan dari sektor minyak telah menyebabkan usaha yang dimaksudkan kurang mendapat penekanan.

Tabel 1

PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA (juta US\$)

	1978		1979		1980		1981		1982	
	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
Amerika Serikat	2.962,24 (25,44%)	832,2 (12,44%)	3.170,69 (20,34%)	1.027,8 (14,27%)	4.303,34 (19,64%)	1.409,2 (13,01%)	4.083,82 (18,35%)	1.794,8 (13,53%)	3.546,01 (15,91%)	2.417,2 (14,34%)
Jepang	4.565,52 (39,21%)	2.016,4 (30,14%)	7.191,86 (46,13%)	2.103,4 (29,20%)	1.078,38 (49,22%)	3.413,0 (31,50%)	10.545,86 (47,38%)	3.989,0 (30,06%)	11.192,56 (50,21%)	4.278,5 (25,38%)
ASEAN	1.477,89 (12,69%)	657,4 (9,83%)	2.232,57 (14,32%)	839,9 (11,66%)	2.759,35 (12,59%)	1.350,4 (12,46%)	2.682,94 (12,05%)	1.702,1 (12,82%)	3.502,45 (15,71%)	3.301,7 (19,58%)
Uni Soviet	51,60 (0,44%)	14,8 (0,22%)	54,77 (0,35%)	13,6 (0,19%)	72,93 (0,33%)	19,8 (0,18%)	79,98 (0,36%)	41,1 (0,31%)	22,35 (0,10%)	39,2 (0,23%)
Hongkong	42,93 (0,37%)	142,2 (2,13%)	99,05 (0,64%)	101,6 (1,41%)	151,90 (0,69%)	139,4 (1,29%)	135,26 (0,61%)	67,8 (0,51%)	145,02 (0,65%)	86,6 (0,51%)
RRC	—	122,2 (1,67%)	—	131,8 (1,83%)	—	197,3 (1,82%)	—	253,5 (1,91%)	—	230,9 (1,37%)
Total	11.643,17	6.690,4	15.590,14	7.202,3	21.908,89	10.834,4	22.260,34	13.272,1	22.293,34	16.858,9

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia, beberapa penerbitan.

Sebagai akibatnya dengan terjadinya resesi ekonomi dan gambaran kelabu mengenai harga minyak di pasaran internasional, Indonesia dipaksa melakukan usaha penggalakan ekspor terutama non-migas dan diversifikasi tanpa harus menunggu lebih lama.

Dalam keadaan yang dapat dikatakan cukup memaksa dan sesudah memperkirakan kepentingan nasional dari berbagai segi baik yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang maka negara-negara sosialis atau komunis mendapat perhatian yang wajar.

Sejak terjadinya pengkhianatan G-30-S/PKI, perdagangan atau hubungan ekonomi Indonesia dengan Uni Soviet mengalami kelesuan. Dalam Tabel 2 dapat dilihat bahwa dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1981 ekspor Indonesia ke Uni Soviet terus mengalami peningkatan walaupun dari segi impor terjadi fluktuasi yang cukup berarti. Tetapi walaupun ekspor Indonesia ke Uni Soviet terus meningkat, sahamnya dalam seluruh ekspor Indonesia masih sangat kecil atau bahkan dapat dikatakan dapat diabaikan. Melihat faktor ini dapat dikatakan bahwa potensi perdagangan antara Indonesia-Uni Soviet belum diwujudkan menjadi kenyataan -- yang berarti bahwa sebenarnya masih terdapat peluang untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara kedua negara. Hal ini akan semakin jelas bila kita mengamati jenis-jenis komoditi yang diperdagangkan kedua negara. Sampai sekarang baik ekspor maupun impor Indonesia hanya terdiri dari beberapa jenis komoditi saja yaitu, Indonesia mengeksport karet, lada hitam, kulit manis, kulit domba, pakaian jadi dan ban mobil prahoto (masih dalam percobaan), sedang impor meliputi pupuk, kapas, kaca, mesin tekstil, traktor dan barang elektronik. Di samping itu, selama ini Uni Soviet masih melakukan impor barang-barang yang berasal dari Indonesia melalui Negara Ketiga seperti Singapura. Dengan mengadakan hubungan perdagangan langsung maka hubungan ekonomi kedua negara dapat ditingkatkan.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa peningkatan perdagangan Indonesia dengan Uni Soviet akan meningkatkan ketergantungan Indonesia kepada Soviet tetapi tidak demikian sebaliknya sehingga akan berakibat negatif terhadap Indonesia. Bagaimanapun juga, sudah menjadi kenyataan di mana-mana ketergantungan ekonomi antar negara adalah merupakan kenyataan yang tidak terelakkan. Yang menjadi masalah yang perlu mendapat penanganan yang serius adalah bagaimana ketergantungan tersebut dikelola sehingga manfaat optimalnya dapat dicapai. Melihat kecilnya saham perdagangan Indonesia dengan Uni Soviet dalam total perdagangan Indonesia dewasa ini maka sebenarnya dari segi ekonomi belum terlihat kendala yang begitu menonjol untuk tidak menggalakkan perdagangan Indonesia dengan Uni Soviet lebih cepat atau bahkan lebih cepat dari perdagangan dengan negara-

negara lainnya. Hal ini berarti bahwa yang perlu mendapat perhatian baik dalam jangka pendek dan mungkin jangka menengah adalah bagaimana mengatasi masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan peningkatan hubungan ekonomi tersebut.

Tabel 2

NERACA PERDAGANGAN RI-UNI SOVIET (1975-1983)

	Ekspor		Impor		Saldo
	Volume (ton)	Nilai FOB (US\$)	Volume (ton)	Nilai CIF (US\$)	
1975	44.665,3	25.568.000	198.672,0	37.386.000	-11.818.000
1976	54.826,7	36.760.000	69.913,0	16.729.000	+20.031.000
1977	37.128,9	32.209.110	13.745,7	10.091.266	+22.117.844
1978	59.413,2	51.603.306	39.596,5	14.773.804	+36.829.502
1979	49.913,7	54.771.462	39.267,8	13.618.477	+41.152.985
1980	52.875,0	72.925.045	35.436,0	19.757.505	+53.167.540
1981	76.151,5	79.979.008	98.942,3	41.109.692	+38.869.316
1982	26.828,0	22.355.201	119.981,6	39.186.798	-16.831.597
1983 (Jan.-Juli)	29.681,3	24.561.442	36.562,4	15.969.852	+ 8.591.540

Sumber: BPS, *Business News*, 13 Juni 1984.

Catatan: Komoditi Ekspor Indonesia: karet, lada hitam, pakaian jadi dan dicoba ban mobil (prahoto), kulit manis, kulit kambing/domba.

Impor Indonesia : pupuk, kapas, kaca, barang modal (peralatan mesin tekstil, alat telekomunikasi, kontainer, traktor, elektronika).

Kontrak karet 1984 : 80.000 ton (diperlukan).

Kontrak kopi 1984 : 2.000 ton.

PERDAGANGAN DENGAN UNI SOVIET LEBIH MUDAH?

Ketika menerima delegasi Kadin Indonesia yang pernah melakukan kunjungan ke negara-negara Eropa Timur beberapa waktu yang lalu, Menteri Perdagangan, Rachmat Saleh mengemukakan bahwa berdagang dengan Uni Soviet lebih mudah dibanding Eropa Barat karena impor negara tersebut masih begitu ditentukan oleh rencana yang dilakukan oleh trading house-nya sehingga tidak banyak pihak yang perlu dihubungungi oleh pengusaha Indonesia. Sebagai negara yang menerapkan "Glasnost" dan "Perdagangan Bebas" dengan

alat produksi dan lembaga-lembaga perdagangan di Republik Sosialis Soviet berada di bawah pengawasan pemerintahnya. Perdagangan luar negeri dimonopoli oleh negara dengan sistem perusahaan-perusahaan negara yang bekerja atas rencana tahunan dan rencana lima tahunan. Rencana impor tahunan diumumkan hanya sebagian saja dan bagi perusahaan-perusahaan luar negeri tidak mungkin menjajaki keseluruhannya. Di samping itu pada prinsipnya pemerintah Uni Soviet tidak menyediakan devisa untuk impor barang-barang yang tidak urgen dan tidak langsung dibutuhkan oleh rakyat banyak. Uni Soviet juga memberi preferensi impor kepada negara-negara Blok Timur. Dewasa ini perusahaan negara yang melakukan perdagangan luar negeri ada kira-kira sebanyak 60 buah dan masing-masing bekerja menurut spesialisasi tertentu (menurut jenis komoditi) yang keseluruhannya berada di tangan organisasi Kementerian Luar Negerinya yang dikenal sebagai *Ministerstwo Wneschney Torgowli SSR*.

Dilihat dari segi kelembagaan memang berdagang dengan Uni Soviet tampaknya lebih mudah dan urusannya lebih sederhana. Namun demikian kebijaksanaan Uni Soviet yang mengumumkan hanya sebagian dari rencana impor tahunannya tentu akan menyulitkan para eksportir Indonesia menjual barangnya ke negara tersebut.

Salah satu masalah lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah masalah harga. Di negara-negara yang menganut ekonomi pasar harga dapat dijadikan signal bagi mungkin tidaknya perdagangan antar negara dilakukan. Tetapi di Rusia harga dan permintaan tidak ditentukan oleh mekanisme pasar tetapi merupakan manifestasi dari kebijaksanaan negara -- yang bobot terbesarnya dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Hal ini tentu bukan merupakan masalah yang gampang dihadapi. Adanya kemauan politik Uni Soviet dewasa ini untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih baik dengan Indonesia memang dapat dijadikan jaminan bahwa perdagangan antara kedua negara akan berkembang dengan baik. Tetapi yang menjadi pertanyaan tentunya, bagaimana hubungan tersebut dapat berjalan tanpa terlalu banyak dipengaruhi oleh suhu politik. Hal ini perlu dipersiapkan dari sekarang karena bagi Indonesia, Uni Soviet adalah merupakan suatu kesatuan yang dalam hubungan dagangnya tidak sulit mengesampingkan dan/atau menomorduakan pertimbangan ekonomis.

Berhadapan dengan sistem seperti yang dianut di Rusia, bagi para eksportir Indonesia mungkin cara yang lebih tepat adalah dengan mengikat kontrak (jual-beli) di mana kontrak tersebut memungkinkan Indonesia bertindak lebih luwes bilamana terjadi perubahan suhu politik di Rusia.

Selama ini pengkoordinasian hubungan dagang antara Indonesia dengan negara-negara sosialis (termasuk Rusia) dilakukan oleh PT Panca Niaga.

usaha yang mengkoordinasi perdagangan dengan negara-negara sosialis. Semua transaksi antara pengusaha-pengusaha Indonesia dengan perusahaan negara-negara sosialis dilakukan melalui Panca Niaga. Pengorganisasian ini oleh beberapa orang dinilai sudah kurang tepat dan penunjukan PT Panca Niaga sebagai koordinator tunggal perlu ditinjau karena pelayanannya selama ini kurang cepat.

Pelayanan yang cepat, tepat dan ekonomis bagi para pengusaha memang merupakan sesuatu tuntutan yang mutlak dipenuhi. Agar dapat memenuhi tuntutan tersebut, pemerintah telah memberi kesempatan kepada para eksportir dan importir berhubungan langsung dengan pihak Rusia tanpa koordinasi PT Panca Niaga.

Seperti dikemukakan sebelumnya, dalam urusan dagang dengan Rusia, pengusaha Indonesia berhadapan dengan perusahaan negara Rusia yang merupakan suatu kesatuan dengan pemerintahnya atau para pembuat keputusan politik. Hal ini berarti bahwa kalau para pengusaha Indonesia secara individual dibiarkan berhubungan langsung dengan pihak Rusia, kedudukan pengusaha Indonesia akan lemah bila timbul permasalahan atau persengketaan atau sesedikitnya Pemerintah Indonesia akan lebih lambat untuk dapat mengetahui permasalahannya dan/atau membantu untuk memecahkannya. Hal ini berarti pengkoordinasian perdagangan oleh suatu badan (dalam hal ini dalam bentuk asosiasi) tampaknya adalah cara yang terbaik. Masalah yang masih melekat seperti kekuranggesitan atau kelambanan tentu tidak sulit diatasi asal saja hubungan antara para pengusaha Indonesia baik secara perorangan maupun perkumpulan dapat terpelihara dengan baik. Sehubungan dengan ini kiranya perlu diingat bahwa walaupun penampilan suatu orchestra kurang memuaskan tidak lantas berarti bahwa maestronya harus diganti atau ditambah karena ada kemungkinan, para pemainnya yang kurang disiplin, sound system-nya kurang baik, kurangnya pemain, atau bahkan maestronya diharapkan mengorganisasikannya demikian dengan berbagai macam pertimbangan.

BARTER DAN STANDARDISASI

Dalam pembicaraan antara Kadin Indonesia dengan Kadin Uni Soviet, pihak Uni Soviet menawarkan mesin-mesin dan peralatan-peralatan produksinya untuk ditukarkan (dibarterkan) dengan barang-barang komoditi ekspor non-migas Indonesia sebagai upaya meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara. Bagi Uni Soviet pengorganisasian perdagangan barter mudah dilakukan karena semua perusahaan adalah perusahaan negara dan terkoordinasi dengan baik. Tetapi bagi Indonesia perdagangan barter lebih sulit dilakukan karena untuk ini mungkin harus dilibatkan beberapa pengusaha yang tidak ada dalam daftar perusahaan yang diizinkan untuk melakukan barter.

melakukan perdagangan secara barter semakin memperjelas bahwa kebutuhan agar pihak Indonesia dikoordinasikan dalam satu wadah dalam menghadapi Uni Soviet kiranya semakin jelas.

Dewasa ini Uni Soviet telah melakukan perdagangan dengan 143 negara dan volume perdagangannya mencapai kira-kira sebesar US\$165 milyar. Komposisi perdagangannya adalah 56% dengan negara-negara sosialis, 30% dengan negara kapitalis dan 14% dengan negara-negara berkembang. Komposisi perdagangan seperti ini menunjukkan bahwa Uni Soviet telah mempunyai cukup pengalaman melakukan hubungan dengan negara-negara yang menganut ekonomi pasar tetapi mungkin tidak demikian sebaliknya. Dewasa ini pada umumnya banyak pihak yang tidak menyenangi produksi atau hasil produksi Uni Soviet terutama peralatan atau mesin-mesinnya karena kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dan bentuknya kurang meyakinkan serta suku cadangnya tidak tersedia dengan mudah seperti suku cadang dari hasil produksi Jepang. Keengganan sebagian konsumen terhadap hasil produksi Uni Soviet semakin besar karena ukuran ataupun standar dari mesin-mesin atau peralatan-peralatan yang mereka produksi biasanya khusus. Hal ini akan berakibat bahwa semakin banyak peralatan dan mesin-mesin buatan Rusia yang digunakan Indonesia maka semakin besar ketergantungan kita terhadap mereka. Hal seperti ini tentu bukan hal yang diinginkan sehingga dalam hubungan perdagangan (barter) pihak Indonesia perlu terus berhati-hati agar jangan sampai tergiur dengan tawaran harga dan lupa aspek keluwesan dalam hubungannya dengan ketergantungan. Pihak Indonesia harus berusaha agar mesin-mesin yang diimpor sesuai dengan standar yang berlaku atau bahkan sesuai dengan rencana industrialisasi yang hendak dilakukan.

Oleh negara-negara sosialis seperti Uni Soviet, pada umumnya kepentingan politik dimanifestasikan dalam hubungan ekonomi. Hal ini jelas terlihat dari adanya preferensi-preferensi yang diberikan oleh negara sosialis kepada negara sosialis lainnya dalam hubungan ekonomi. Kenyataan seperti ini perlu untuk dipikirkan sehingga hubungan ekonomi dengan Uni Soviet dapat kita letakkan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Hendaknya disadari bahwa bantuan apa pun yang diberikan oleh Uni Soviet bukan tanpa tujuan dan bukan hanya merupakan hibah, tetapi sebaliknya, tawaran bantuan ekonomi hendaknya jangan lantas ditanggapi sebagai kepentingan politik belaka.

Pengalaman di masa lalu telah memberikan banyak pelajaran bagi Indonesia dalam menjalin hubungan dengan Uni Soviet. Pengalaman ini tentunya tidak perlu dilupakan tetapi justru dipelajari secara lebih mendalam, agar usaha peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan Uni Soviet dapat berjalan dengan baik tanpa harus menimbulkan friksi-friksi yang tidak di-

Hubungan Vietnam-Uni Soviet*

J. Soedjati DJIWANDONO

Salah satu segi dalam masalah Kampuchea yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN adalah hubungan Vietnam dengan Uni Soviet. Persepsi atau pandangan tentang hubungan Vietnam-Uni Soviet ini besar arti dan pengaruhnya atas pemikiran dan usaha ke arah pemecahan masalah Kampuchea dan kaitannya dengan masa depan ASEAN dan Asia Tenggara secara keseluruhannya.

Pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul dalam masalah ini adalah, apakah Vietnam sekedar menjadi moncong (mouthpiece, proxy) Uni Soviet? Jika demikian, apakah Uni Soviet dapat diharapkan atau dihimbau untuk mempergunakan pengaruhnya sehingga Vietnam bersedia mengubah sikapnya menjadi lebih "lunak," yaitu ke arah suatu penyelesaian masalah Kampuchea yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan ASEAN? Tentu saja jika jawaban terhadap pertanyaan pertama positif, jawaban terhadap pertanyaan kedua besar kemungkinannya positif. Tetapi sebaliknya, jawaban positif terhadap pertanyaan kedua tidak perlu berarti bahwa jawaban terhadap pertanyaan pertama juga positif.

Meskipun demikian terlepas dari masalah apakah Vietnam tidak lebih dari moncong Soviet, sehingga dengan demikian menjadi alat "ekspansionisme Soviet," kenyataannya adalah bahwa salah satu akibat penting dari perselisihan antara Vietnam di satu pihak dan Cina serta klik Pol Pot - Khmer Merah di lain pihak, adalah semakin meningkatnya kehadiran dan peranan Soviet di Vietnam yang semakin tergantung pada dukungan dan bantuan militer, politik dan ekonomi Soviet. Oleh karena itu pertanyaan berikutnya yang sering timbul adalah, apakah meningkatnya kehadiran Soviet di Vietnam

*Kerjasama ini pernah dimuat di "Suara Merdeka" tanggal 12 Agustus 1975.

itu tidak merupakan ancaman terhadap keamanan dan keutuhan negara-negara ASEAN?

NASIONALISME VS "EXPEDIENCY"

Suatu anggapan atau tuduhan sering dilontarkan orang bahwa Vietnam tidak lebih daripada suatu "proxy" Soviet, suatu "alat politik luar negeri Soviet," "alat ekspansionisme Soviet," dan orang-orang Vietnam bertindak sebagai "orang-orang Kuba di Asia Tenggara." Dan sehubungan dengan itu, konflik Vietnam-Kampuchea (di bawah Pol Pot) tidak lebih dari suatu dua "proxy war" antara Moskow dan Beijing.

Dalih-dalih yang dikemukakan untuk membenarkan anggapan atau tuduhan semacam itu antara lain ialah bahwa penyerbuan Vietnam atas Kampuchea menjelang akhir tahun 1978 telah didahului oleh masuknya Vietnam sebagai anggota Comecon dalam bulan Juni, dan ditandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama antara Vietnam dan Uni Soviet dalam bulan November; bahwa sejak itu Vietnam semakin tergantung pada bantuan diplomatik, militer dan ekonomi Soviet bagi pendudukannya atas Kampuchea, dan dugaan bahwa Vietnam telah memberikan kepada Uni Soviet "pangkalan-pangkalan militer" di Cam Rahn Bay dan Da Nang.

Kalaupun fakta-fakta yang dikemukakan sebagai dalih itu benar, kesimpulan yang ditarik bahwa Vietnam tidak lebih daripada suatu "moncong" Soviet kelihatan terlalu gegabah karena fakta-fakta itu dinilai lepas dari rangkaian kejadian-kejadian dan konteks yang lebih luas. Lebih dari para pengamat dan analis di luar Vietnam, pimpinan Vietnam sendiri kelihatan menyadari risiko yang terkandung dalam ketergantungan yang terlalu besar pada sesuatu negara sebagai sumber bantuan.

Hal itu kelihatan dari usaha-usaha Vietnam antara tahun 1976 dan 1977 ke arah diversifikasi sumber-sumber bantuan ekonomi dan teknologi. Setelah mendapatkan kursi yang sebelumnya ditempati oleh Vietnam Selatan dalam IMF dan Bank Dunia dalam tahun 1976, berbagai tim dari badan-badan dunia itu maupun dari Bank Pembangunan Asia mengunjungi Vietnam dalam tahun berikutnya. Kunjungan tim IMF, misalnya, menghasilkan pinjaman sebesar US\$36.000.000 untuk mengatasi kekurangan pendapatan devisa. Dalam bulan April 1977, PM Pham Van Dong mengunjungi Perancis dan memperoleh janji bantuan sebesar US\$264.000.000. Menjelang akhir tahun 1977, kurang lebih sepuluh negara non-komunis telah terlibat dalam segala macam program bantuan ekonomi dan teknik bagi Vietnam.

Sebaliknya, pengalaman dengan Uni Soviet pada tahun-tahun yang bersamaan dalam hal bantuan bagi Vietnam tidak semanis seperti mungkin

diharapkan banyak orang. Dilaporkan, misalnya, bahwa pada tahun 1977, Uni Soviet menolak membangun kompleks baja di Vietnam, yang diperlukan sebagai basis industri berat yang tangguh. Dikabarkan pula bahwa Uni Soviet menerima hasil industri yang dibangunnya di Vietnam dengan harga yang jauh di bawah tingkat pasaran dunia. Sebab itu tidak mengherankan jika Vietnam menolak tawaran bantuan Soviet dalam mencari minyak lepas pantai, suatu usaha yang akhirnya diserahkan pada Perancis.

Di samping itu, sebelum akhirnya masuk sebagai anggota penuh Comecon, Vietnam telah menentang desakan-desakan Soviet untuk melakukan hal itu. Tetapi setelah sebagian bantuan Cina dibekukan dalam hubungan konflik dengan Kampuchea dan Cina sepanjang perbatasan, hal itu dilakukan juga sebagai usaha mencari sumber bantuan baru. Begitu pula meskipun Vietnam tidak memberikan tanggapan positif terhadap gagasan Soviet tentang sistem keamanan bersama Asia, akhirnya Vietnam menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan Uni Soviet, yang bagi Vietnam besar artinya sebagai sekutu yang imbang tetapi toh jauh jaraknya untuk menandingi ancaman Cina.

Pendekatan pada Uni Soviet itu harus dilihat pula dalam kaitannya dengan isolasi Vietnam sejak tahun 1975. Uni Sovietlah yang merupakan pendukung utama bagi keanggotaan Vietnam dalam PBB, yang dengan demikian menembus isolasi itu. Jauhnya Uni Soviet dari Vietnam dan dekatnya Cina kiranya dapat memberikan kepada Vietnam kesempatan untuk lebih bebas bergerak dalam menghadapi kemungkinan pengaruh Soviet, misalnya dalam bentuk kehadiran pasukan Soviet. Vietnam, maupun Asia Tenggara secara keseluruhannya, tidak pernah mempunyai arti vital bagi Uni Soviet dari segi keamanan nasionalnya sebagaimana halnya dengan Eropa Timur, misalnya.

Demikian pula, anggapan bahwa konflik Kampuchea semata-mata merupakan suatu "proxy war" antara Moskow dan Beijing tidak melihat latar belakang konflik yang nyata antara Vietnam dan Kampuchea di bawah rezim Pol. Pot. Paling banter dapat dikatakan bahwa dalam perkembangannya sekarang konflik Kampuchea itu kini merupakan suatu "proxy war" dalam arti bahwa baik Moskow maupun Beijing telah memihak pada sekutu masing-masing dalam konflik itu.

Tuduhan bahwa karena meningkatnya ketergantungan pada dukungan dan bantuan Soviet, Vietnam telah menjadi antek Soviet juga tidak bertanggung jawab, oleh karena dunia luar tidak membuka pintu ke arah alternatif sumber bantuan bagi Vietnam. Dengan demikian sebenarnya dunia luar ikut semakin menjerumuskan Vietnam ke dalam lembah ketergantungan yang semakin besar pada Uni Soviet dengan segala risikonya tidak saja bagi Vietnam tetapi mungkin pula bagi Asia Tenggara secara keseluruhannya.

Memang, alternatif semacam itu telah sering disebut, tetapi dengan kondisi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kampuchea tanpa syarat. Tanpa membenarkan Vietnam ke Kampuchea, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, pendirian semacam itu yang didasarkan semata-mata pada landasan moral dan yuridis-formal, tanpa kehendak memahami apalagi mengakomodasikan kepentingan-kepentingan yang dianggap vital oleh Vietnam, mencerminkan kekurangfahaman tentang makna hukum internasional dan prinsip serta dinamika hubungan internasional. Sikap semacam itu pada dasarnya juga bertentangan dengan usaha untuk mencapai suatu "pemecahan politik" atas masalah Kampuchea.

Dapat dipastikan, bahwa secara ideal setiap negara ingin dapat berdikari sepenuhnya dalam memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya. Ini dapat dianggap sebagai salah satu segi atau pencerminan dari faham atau perasaan nasionalisme yang melandasi eksistensi negara bangsa dalam arti yang modern. Tetapi realitas kehidupan politik internasional selalu saja memberikan batas-batas pada pelaksanaan prinsip itu. Di sinilah kelihatan seakan-akan terjadi suatu pertentangan antara prinsip nasionalisme dan prinsip "expediency."

Meskipun demikian, pertentangan itu mungkin hanya bersifat semu, oleh karena apa yang kelihatan dikorbankan mungkin hanya ditangguhkan. Kepentingan jangka pendek dikorbankan atau ditangguhkan demi kepentingan jangka panjang dan lebih besar. Dalam hal itu yang terjadi adalah perubahan urutan prioritas kepentingan nasional pada sesuatu saat.

Hal itu tentu saja tidak merupakan jaminan bahwa dalam hal mengubah urutan prioritas kepentingan nasionalnya, sesuatu negara tidak menempuh risiko berbuat salah. Apa yang ditangguhkan boleh jadi akhirnya ternyata betul-betul terkorbankan dan tidak terpenuhi sama sekali. Suatu politik untuk mengisolasi Vietnam, apalagi apa yang disebut "bleeding Vietnam white" dengan terus-menerus melakukan tekanan dalam segala bidang akan memperbesar kemungkinan terwujudnya sesuatu yang justru kita khawatirkan. Itulah suatu sikap atau kebijakan yang kontraproduktif.

NASIONALISME VS IDEOLOGI

Anggapan bahwa Vietnam adalah moncong Soviet didasarkan juga pada kenyataan bahwa kedua negara menganut ideologi yang sama, yaitu Marxisme-Leninisme. Tetapi persamaan ideologi tidak perlu mengandung arti pengaruh. Seperti telah disinggung di atas, Vietnam menolak untuk mendukung gagasan Soviet tentang sistem keamanan kolektif Asia.

Anggapan demikian juga menutup mata terhadap fragmentasi gerakan komunis dunia yang terutama disebabkan oleh akibat-akibat yang destruktif dari aliran nasionalisme. Akibat ini akan lebih besar sepanjang hal itu, menyangkut negara-negara komunis yang jauh letaknya dari Uni Soviet, seperti Vietnam dan Yugoslavia, apalagi dengan pimpinan nasional yang kuat, populer, dan penuh inisiatif sendiri seperti Ho Chi Minh dan Tito.

Tingkat kebebasan dari pengaruh Soviet juga ditentukan oleh pengalaman mula-mula kaum komunis merebut kekuasaan. Vietnam, seperti halnya Cina, ataupun Yugoslavia dan Albania di Eropa Timur, berhasil dalam revolusinya tanpa dukungan kekuatan Soviet seperti yang terjadi dengan sebagian besar negara-negara Eropa Timur. Oleh karena itu Vietnam tidak berhutang budi kepada Moskow bagi keberhasilan revolusinya. Sebenarnya Vietnam bahkan pernah menekankan inspirasi yang diperolehnya dari Amerika Serikat dalam perjuangannya melawan Jepang dan secara terbuka mengajukan appeal bagi dukungan AS.

Meskipun Ho Chi Minh sendiri pernah bergabung dengan Komunis Internasional (Komintern), kaum komunis Vietnam tidak pernah menjadi bagian yang erat dengan gerakan komunis internasional selama maupun setelah berakhirnya Perang Dunia II. Selama perang itu Uni Soviet sedikit sekali menaruh perhatian pada Indocina atau peranan Partai Komunis Indocina dalam gerakan melawan Jepang. Kurangnya perhatian pada Asia Tenggara oleh Komintern ataupun Stalin, seperti akan dibahas lebih lanjut di bawah ini, atau rendahnya prioritas pada masalah-masalah Asia umumnya, telah kelihatan sejak kegagalan politik Stalin di Cina dalam tahun 1920-an. Hal ini pula yang menjelaskan mengapa Vietnam telah bebas dari pengaruh atau kontrol Stalin dan pimpinan komunis Vietnam bebas dari tindakan-tindakan pembersihan Stalin sebagaimana halnya yang terjadi pada pimpinan komunis Eropa Timur. Dan Vietnam umumnya dibiarkan bebas untuk mengembangkan cara-caranya sendiri dalam menghadapi situasi di Indocina.

Apa pun alasannya, Vietnam pada mulanya kelihatan tidak menekankan peranan utama kaum komunis dalam revolusi kemerdekaan. Hanya diakui partisipasi beberapa orang Marxis dalam pemerintahan, tetapi penerapan Marxisme di Vietnam bahkan disangkal. Dalam perumusan kebijakan-kebijakannya, yang menjadi pedoman utama bagi pemimpin-pemimpin Vietnam pada waktu itu, khususnya Ho Chi Minh, adalah nasionalisme dan anti-kolonialisme, sedangkan faham komunisme pada mulanya tidak lebih daripada suatu alat yang menarik dan efektif. Pada tahun 1960, Ho Chi Minh pernah menulis bahwa:

"Mula-mulanyalah patriotismeku, dan sama sekali belum Komunisme, yang membawaku kepada Lenin dan Komunis Internasional. Hanya kemudian, selama pertempuran-pertem-

puran, dalam mempelajari teori Marxisme-Leninisme, dan dalam partisipasi dalam kerja praktis, aku tiba pada pengertian bahwa hanya Sosialisme, hanya Komunisme, dapat membebaskan rakyat-rakyat dan kaum pekerja seluruh dunia dari perbudakan dan penindasan. Aku lalu mengerti ikatan yang tak terlepas antara patriotisme seseorang yang sejati dan internasionalisme proletar."

Kenyataan bahwa kini Vietnam telah menjadi anggota dalam kamp negara-negara komunis, juga tidak semata-mata karena niatnya sendiri. Pada tanggal 14 Januari 1950 Vietnam mengajukan appeal bagi dibukanya hubungan diplomatik dengan "setiap pemerintahan yang menghormati persamaan hak dan kedaulatan teritorial dan nasional Vietnam" jelas bukan merupakan usaha identifikasi diri dengan blok komunis. Meskipun demikian, bisa dimengerti bahwa hasil akhirnya memang demikian, oleh karena hanya negara-negara komunis memberi tanggapan positif. Setelah pada tanggal 18 Januari 1950 RRC, dan kemudian disusul oleh Uni Soviet pada tanggal 30 Januari tahun itu juga memberikan pengakuannya, Vietnam kemudian secara resmi memilih blok komunis. Meskipun demikian, Vietnam tidak mengirimkan seorang duta besar ke Moskow hingga bulan April 1952.

Di samping itu perlu dicatat bahwa sebelum eskalasi perang Vietnam dalam tahun 1965, pengaruh Cina lebih besar daripada Uni Soviet. Ini disebabkan antara lain oleh keuntungan-keuntungan Cina karena letak geografis, kaitan kultural, dan latar belakang sejarah. Semuanya itu lebih memungkinkan kegiatan infiltrasi dan subversi di Indocina, yang tidak bisa dijalankan oleh Uni Soviet.

Baru setelah terjadinya eskalasi perang Vietnam, dengan meningkatnya intervensi AS secara langsung, dan atas pertimbangan-pertimbangan kepentingannya sendiri seperti akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, khususnya dalam kaitannya dengan pertikaian Cina-Soviet, peranan Soviet semakin besar dalam membantu Vietnam. Ini dimungkinkan karena ketergantungan Vietnam pada bantuan militer dan ekonomi. Dan mudah dimengerti bahwa dalam hal itu Vietnam lebih cenderung untuk berpaling pada Uni Soviet, yang mempunyai kesamaan ideologis. Vietnam sendiri, seperti tercermin dalam kata-kata Ho Chi Minh di atas, mengakui inspirasi yang penting dari revolusi Bolshevik bagi revolusi Vietnam.

Juga dalam beberapa hal terdapat kesamaan pandangan antara Vietnam dan Uni Soviet, seperti dalam hal detente dengan AS, Konferensi Keamanan dan Kerjasama Eropa dan Perjanjian Helsinki. Begitu pula Vietnam mendukung politik Soviet dalam hal-hal tertentu seperti dalam masalah Angola dan di Ujung Tanduk Afrika, penyerbuan atas Cekoslowakia, dan sebagainya, sedang terhadap pandangan Cina, Vietnam semakin kritis, seperti pandangan tentang "Tiga Dunia."

Meskipun demikian, terdapat juga perbedaan-perbedaan pandangan seperti dikemukakan di atas. Pada dasarnya, Vietnam tetap menjunjung tinggi nilai kebebasan lebih dari hubungannya dengan Uni Soviet, betapapun dekatnya hubungan itu karena didorong oleh kepentingan-kepentingan nasionalnya. Hal ini tercermin dari sikap yang dikemukakan oleh Le Duan pada Kongres PKUS yang ke-25, yang mendukung Eurokomunisme yang ditentang Uni Soviet, dengan memuji "jalan, bentuk dan cara yang beraneka-ragam dari perjuangan yang sesuai dengan kondisi-kondisi setiap negara untuk memajukan revolusi ke arah tujuan akhir yang mulia."

POLITIK SOVIET

Dalam teori, bantuan Soviet kepada Vietnam sering dijelaskan sebagai pelaksanaan "kewajiban internasional" atas dasar prinsip "internasionalisme proletar." Tetapi jika diteliti sikap dan politik Soviet sejak permulaan, akan kelihatan bahwa prinsip itu tidak banyak isinya, kecuali sebagai alat untuk melayani kepentingan nasional Soviet sendiri.

Memang prinsip bahwa politik luar negeri sesuatu negara diabdikan pada kepentingan nasionalnya bukan monopoli Uni Soviet. Meskipun demikian bagi Uni Soviet yang di samping sebagai negara adikuasa mempunyai kepentingan nasional dan global juga bertindak sebagai eksponen ideologi komunis yang merasa mempunyai kewajiban untuk memajukan cita-cita revolusi dunia, sering kelihatan adanya kepentingan-kepentingan yang seakan-akan bertentangan yang harus dipenuhi dalam politik luar negerinya. Hal ini sering memusingkan para pengamat yang ingin mempersoalkan apakah politik Soviet dilandasi oleh kepentingan nasionalnya sebagai negara ataukah oleh cita-cita ideologinya.

Tetapi teori-teori komunis sangat luwes untuk menjelaskan segala macam fenomena dan kejadian yang sesuai dengan kehendak teoretisnya. Dalam hal gejala pertentangan antara dua macam kepentingan politik luar negeri Soviet tadi, pemecahannya adalah bahwa mengabdikan atau melayani kepentingan nasional Soviet sama saja dengan mengabdikan atau melayani kepentingan revolusi dunia, oleh karena Uni Soviet adalah benteng dan pemimpin revolusi komunis. Oleh karena itu, kepentingan nasional Soviet kelihatan mendapatkan prioritas jika kepentingan revolusi dunia belum bisa segera terpenuhi, sebab kepentingan nasional Soviet itu, atas dasar pemikiran di atas, akhirnya akan melayani kepentingan dalam jangka yang lebih panjang juga.

Secara historis dan tradisional, perhatian Soviet terutama selalu diarahkan lebih pada dunia Barat daripada ke arah kawasan-kawasan lain, termasuk Asia Tenggara, baik dari segi kepentingan nasional Soviet maupun dari segi

kepentingan revolusi komunis dunia. Dunia Barat dilihatnya sebagai sumber ancaman yang terbesar terhadap keamanan nasional Soviet dan saingan utama bagi kepentingan nasional Soviet. Dari segi revolusi dunia, secara teoretis (Marxis), dunia Barat-lah yang memberi harapan besar bagi pecahnya revolusi komunis, meskipun teori ini sebenarnya kini telah usang dan tidak berarti lagi menghadapi perkembangan zaman.

Kawasan Asia Tenggara, atau kawasan lain yang serupa, hanya penting bagi Uni Soviet karena revolusi-revolusi nasional di wilayah itu memperlemah dunia Barat, dan dengan demikian mempercepat proses ke arah revolusi komunis. Oleh karena itu, politik Soviet terhadap Asia Tenggara, termasuk Vietnam, banyak ditentukan oleh situasi di dunia Barat, dan oleh politik Soviet terhadap bagian dunia itu.

Yang menarik adalah bahwa meskipun selesainya revolusi-revolusi nasional sejak berakhirnya Perang Dunia II ternyata tidak diikuti oleh revolusi dunia yang diharap-harapkan, sikap dan politik Soviet terhadap kawasan-kawasan lain seperti Asia Tenggara masih terus diabdikan pada sikap dan orientasi politik Soviet dalam menghadapi dunia Barat, khususnya Eropa dan Amerika Serikat. Dengan atau tanpa revolusi dunia, dunia Barat tetap paling penting dipandang dari segi kepentingan nasional Soviet.

Sebab itu, sejak meletusnya revolusi di Vietnam, meskipun revolusi itu sebenarnya lebih penting bagi Uni Soviet dari segi ideologis daripada revolusi nasional di Indonesia, misalnya, karena peranan utama kaum komunis, Uni Soviet tidak segera menunjukkan perhatian yang besar, apalagi memberikan bantuan. Sebab-sebab yang utama adalah perkembangan yang terjadi di Eropa. Uni Soviet sedang sibuk menanamkan dan mengkonsolidasikan kekuatan dan kekuasaan Soviet di Eropa Timur. Di samping itu, Uni Soviet tidak ingin merugikan kedudukan Partai Komunis Perancis yang pada waktu itu ikut serta dalam pemerintahan yang menjadi lawan revolusi Vietnam.

Reaksi Soviet terhadap revolusi Vietnam tidak lebih daripada membenaran revolusi itu sebagai perjuangan melawan imperialisme. Memang ini sesuai dengan sikap Vietnam sendiri yang tidak menonjolkan peranan pimpinan komunis pada waktu itu seperti disinggung di atas. Tetapi dapat diduga bahwa sikap Uni Soviet itu mempunyai alasan yang berlainan. Molivan Djilas menceritakan dalam bukunya *Percakapan dengan Stalin*, bahwa Stalin sebenarnya menentang, dan malahan mengkhawatirkan suatu revolusi (komunis) yang berhasil tanpa pimpinan, dukungan, dan pengawasan langsung oleh Uni Soviet. Memang terjadi kemudian bahwa negara-negara komunis yang berhasil berdiri tanpa dukungan langsung Uni Soviet seperti Yugoslavia, Albania dan Cina, lebih banyak menimbulkan persoalan bagi Uni Soviet.

Sikap Soviet baru mulai berubah sejak tahun 1947 ke arah dukungan yang lebih jelas bagi Vietnam dengan meningkatnya ketegangan antara Uni Soviet dan negara-negara Barat. Pada tahun itu lahirlah "doktrin dua kamp" yang disampaikan oleh Zhdanov, pada pembukaan berdirinya Kominform. Di samping itu, Partai Komunis Perancis tidak lagi duduk dalam pemerintahan, melainkan terisolasi dalam kelompok oposisi.

Bagaimana Uni Soviet mengabdikan hubungannya dengan Vietnam pada kepentingan politik luar negeri Soviet terutama terhadap negara-negara Barat dan dengan demikian mengorbankan kepentingan Vietnam kelihatan lebih jelas lagi dalam hubungannya dengan Konferensi Geneva tahun 1954. Vietnam sendiri, yang karena posisinya yang kuat terutama setelah kemenangannya di Dien Bien Phu, pada mulanya menolak, tetapi pada akhirnya menerima hasil konferensi terutama karena desakan Soviet bersama Cina. Tetapi untuk meneruskan perjuangannya, Vietnam masih akan tergantung pada dukungan dan bantuan Cina maupun Uni Soviet.

Uni Soviet mendesak penyelesaian Geneva pada Vietnam selagi berada pada puncak hubungannya yang mesra dengan Cina. Uni Soviet ingin membantu Cina untuk memperoleh pengakuan dan peranan sebagai negara besar. Tetapi mungkin lebih penting lagi, Uni Soviet khawatir terhadap garis keras Presiden Eisenhower. Dalam kunjungannya ke Asia Tenggara dalam tahun 1952 Wakil Presiden Nixon berbicara tentang gagasan dibentuknya suatu organisasi semacam NATO di Pasifik. Pada akhir tahun 1953, muncul gerakan di Eropa Barat ke arah pembentukan Masyarakat Pertahanan Eropa. Ini semua dilihat oleh Uni Soviet sebagai bahaya ancaman yang nyata, yang dapat menjurus kepada persenjataan kembali Jerman Barat, dan pada gilirannya akan mengurangi kemungkinan penyelesaian masalah Jerman. Garis keras Eisenhower itu pada tahun 1954 dinyatakan dalam doktrin "massive retaliation" yang dikemukakan oleh Menlu Dulles. Jelas bahwa Uni Soviet tidak hendak mengambil risiko konfrontasi dengan AS, yang mengancam akan melakukan intervensi luas di Vietnam, bahkan mungkin termasuk penggunaan senjata nuklir.

Sesudah Konferensi Geneva, Uni Soviet baru secara resmi menganggap Vietnam (Utara) sebagai anggota kelompok negara sosialis. Tetapi Uni Soviet tidak mendukung diadakannya pemilihan umum bagi penyatuan Vietnam. Tidak pula Uni Soviet mendukung penyatuan Vietnam. Bahkan pada tahun 1957 Uni Soviet mengusulkan diterimanya kedua Vietnam sebagai anggota PBB. Bahwa di mata Uni Soviet Vietnam tidak kelihatan begitu penting terlihat dari kenyataan bahwa dalam kunjungan Khrushchev dan Bulganin ke Afghanistan, India dan Birma yang terkenal pada tahun 1955, Vietnam tidak dimasukkan dalam jadwal. Baru dalam tahun 1956, setelah Kongres PKSU ke-20, untuk pertama kalinya Mikoyan berkunjung secara resmi ke Vietnam. Te-

tapi pada waktu itu telah timbul tanda-tanda meruncingnya hubungan Cina-Soviet. Dan pada akhir kunjungan itu tidak dikeluarkan pernyataan bersama seperti lazimnya.

Dengan semakin meruncingnya perselisihan Cina-Soviet dalam pertengahan tahun 1960-an, barulah Uni Soviet meningkatkan bantuan dan dukungan bagi Vietnam. Tetapi jelas bahwa hal itu dilakukan terutama dalam persaingan dengan Cina, yang menuduh Uni Soviet kurang memperhatikan dan mendukung gerakan pembebasan nasional di Dunia Ketiga. Meningkatnya dukungan dan bantuan bagi Vietnam itu dilakukan juga mengingat semakin besarnya keterlibatan AS dalam perang Vietnam dalam periode yang sama. Uni Soviet tidak ingin kehilangan kedudukan pimpinan dalam gerakan komunis dunia bukan saja karena persaingannya dengan Cina, tetapi juga karena Vietnam Selatan mendapatkan bantuan dari sekutunya, AS. Baik peranan AS maupun Cina mengandung bahaya terhadap kredibilitas Soviet di mata negara-negara komunis. Jelas, bahwa meskipun kini sikap dan politik Soviet terhadap Vietnam tidak lagi terlalu ditentukan oleh perkembangan di Eropa Barat, kepentingan nasional Soviet tetap merupakan motivasi utama.

UNI SOVIET DAN MASALAH KAMPUCHEA

Dari uraian di atas, dapatlah diperoleh gambaran, seberapa jauh dapat diharapkan peranan Soviet dalam usaha mencari penyelesaian atas masalah Kampuchea. Perkembangan ke arah pendekatan antara Cina dan AS sejak permulaan tahun 1970-an, khususnya apa yang dikenal dengan Komunike Shanghai, sangat mengecewakan baik Moskow maupun Vietnam, yang telah merasa dikhianati oleh Cina. Tetapi perselisihan Cina-Vietnam yang terus berkembang sejak itu, dan diperuncing dengan perselisihan antara Vietnam dan Kampuchea di bawah Pol Pot dengan dukungan Cina sejak pertengahan tahun 1970-an, lebih menguntungkan Moskow, oleh karena Vietnam telah mendekati Uni Soviet dalam menghadapi Cina.

Puncak hubungan Vietnam dengan Uni Soviet itu dicapai dengan masuknya Vietnam ke dalam Comecon dan kemudian ditandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama antara kedua negara. Perjanjian itu besar artinya bagi kepentingan strategi global Soviet untuk mengimbangi Cina maupun AS. Dan persekutuan Soviet-Vietnam, bersama dengan persekutuan yang serupa dengan Afghanistan, dan India, Uni Soviet meningkatkan usaha pengepungannya terhadap Cina. Serangkaian persekutuan itu juga merupakan langkah menuju perwujudan dari gagasan Soviet untuk membentuk sistem keamanan kolektif Asia.

Dengan kata lain, meskipun perselisihan antara Vietnam dan Cina bersama klik Pol Pot telah memberi kesempatan bagi berkembangnya kepentingan-kepentingan bersama antara Uni Soviet dan Vietnam, perkembangan itu telah lebih banyak menguntungkan Uni Soviet daripada Vietnam. Meskipun Vietnam semakin bergantung pada dukungan dan bantuan Soviet, tampaknya Uni Soviet lebih berkepentingan akan diteruskannya ketergantungan itu. Dengan fasilitas-fasilitas militer yang disediakan di Cam Ranh Bay dan Da Nang, Uni Soviet memperoleh kesempatan untuk terus meningkatkan kehadirannya di Asia Tenggara.

Dari segi pandangan seperti dikemukakan di atas bahwa Vietnam bukanlah sekedar moncong Soviet, sukar diharapkan bahwa Uni Soviet akan mudah diharapkan untuk dapat mempergunakan pengaruhnya terhadap Vietnam sehingga Vietnam akan mengubah sikapnya ke arah pendekatan pada posisi ASEAN. Sedang mengingat ketergantungan Vietnam yang semakin meningkat pada bantuan Soviet, kelihatannya sepintas lalu memang bisa diharapkan bahwa Uni Soviet mampu mempergunakan pengaruhnya untuk mengubah sikap Vietnam yang mungkin lebih meratakan jalan ke arah penyelesaian masalah Kampuchea. Di masa lalu, seperti yang terjadi pada Konferensi Geneva pada tahun 1955, Vietnam menanggapi desakan Soviet, dan Cina karena ketergantungannya pada kedua negara besar itu.

Akan tetapi menjadi persoalan apakah Uni Soviet bersedia mempergunakan pengaruhnya terhadap Vietnam? Uni Soviet hanya bersedia melakukan hal itu jika dirasanya tindakan itu menguntungkan kepentingannya. Oleh karena itu yang menjadi inti persoalannya dalam hal ini adalah imbalan apa yang dapat diharapkan Uni Soviet bagi peranan semacam itu. Dengan kata lain dapat dipersoalkan juga, apakah Uni Soviet memang berminat dalam tercapainya penyelesaian atas masalah Kampuchea secara cepat, ataukah berlarutnya konflik seperti sekarang ini lebih menguntungkan kepentingan nasionalnya?

Satu faktor yang mungkin mempunyai arti bagi Uni Soviet dalam mempertimbangkan kemungkinan peranannya dalam usaha mencari pemecahan masalah Kampuchea adalah prospek pendekatannya dengan Cina. Faktor utama dalam masalah Kampuchea, maupun faktor utama pengikat persekutuan antara Uni Soviet dan Vietnam adalah pertikaian dengan Cina, meskipun hal itu dikaitkan pula dengan hubungan Soviet dengan AS. Oleh karena itu sikap Soviet dalam masalah Kampuchea, dan kemungkinan peranannya dalam usaha penyelesaian akan tergantung terutama pada perkembangan hubungannya dengan Cina.

Tetapi sementara itu hubungannya dengan Cina maupun dengan Vietnam

hubungan Cina-Vietnam dan Cina-AS. Dengan kata lain, pemecahan masalah Kampuchea memang menghendaki peranan bukan saja negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk ASEAN, tetapi juga negara-negara besar. Tetapi dengan kecilnya harapan akan berperannya AS dalam jangka waktu yang dekat, kita tiba pada suatu lingkaran setan. Masalahnya adalah bagaimana suatu usaha dapat dilakukan untuk menerobos lingkaran itu? Di mana harus dimulai?

Tanpa mengulasnya lebih jauh dalam tulisan ini, kelihatan bahwa serangkaian langkah perlu ditempuh ke arah pemecahan akhir. Langkah-langkah yang kini pernah diajukan oleh pihak Vietnam, yang dalam urutannya pada akhirnya melibatkan semua pihak yang bersangkutan, langsung maupun tak langsung, dalam masalah Kampuchea, kelihatannya cukup sehat dan masuk akal untuk sekurang-kurangnya dipelajari.

